

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk terkait dibidang tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1990. Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan.

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (undang-undang no 10 tahun 2009). Jadi dalam pengertian ini wisatawan adalah semua orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan. Menurut Pitana dan Diarta (2009:185) Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi. Selain itu, sektor wisata juga dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk memperbesar pendapatan asli daerah pemerintah perlu mengembangkan tempat-tempat pariwisata untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan sumbangan bagi pembangunan

ekonomi. Perkembangan pariwisata berdampak bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya, salah satunya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan daerah.

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber pendapatan daerah (Nasrul, 2010).

Kabupaten pangandaran merupakan kabupaten baru yang awalnya menjadi bagian dari kabupaten ciamis. Kabupaten pangandaran memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata. Di kabupaten pangandaran memiliki banyak objek wisata dengan keindahan tersendiri, diantaranya pantai, air terjun, wisata alam dan lain sebaagainya. Selain itu daerah pangandaran juga memiliki berbagai macam sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yang di dalamnya yaitu sektor pariwisata.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pengunjung**

Tahun	Wisatawan mancanegara	Wisatawan domestik	Jumlah pengunjung
2014	13.086	1.393.713	1.406.799
2015	16.515	2.442.413	2.458.928
2016	10.776	1.997.614	1.988.390

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi. Jumlah kunjungan wisatawan paling tinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.458.928. Sedangkan jumlah kunjungan paling rendah berada pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.406.799. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dengan tidak stabilnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke tempat tujuan wisata. Sehingga menjadi tugas bagi pemerintah khususnya dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan Penerimaan Asli Daerah yaitu “Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang”

Kemampuan daerah dalam hal mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan bagi daerah yang merupakan usaha murni daerah Kabupaten Pangandaran, yang digali dan diupayakan di daerah oleh aparat daerah setempat, yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting demi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang diemban oleh Kabupaten Pangandaran. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Menurut Guritno Mangkusubroto (1997) yang dimaksud dengan penerimaan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang di terima oleh pemerintah dan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah daerah didapatkan melalui pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah melalui pinjaman pemerintah daerah , baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang dimaksudkan penerimaan pemerintah melalui pajak yaitu: 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Tabel 2**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran**  
**Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio (%)</b>
2014	46.323.540.943	32.473.188.880	70,10%
2015	64.521.332.253	64.506.109.513	99,97%
2016	75.926.441.990	66.385.348.153	87,43%

*Sumber :BPKD Kabupaten Pangandaran*

Berdasarkan tabel data Pendapatan asli Daerah (PAD) diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD masih kurang maksimal dalam realisasinya. Seperti pada tahun 2014 yang hanya terealisasi sebesar 32.473.188.880 dari anggarann 46.323.540.943 yang artinya tidak terealisasi secara maksimal atau kurang dari 100%. Pada tahun 2015 terealisasi 64.506.109.513 dari anggaran 64.521.322.253 atau dalam persen sebesar 99,97%. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 66.385.348.153 dari anggaran 75.926.441.990 atau dalam persen sebesar 87,43%.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yaitu Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapaan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan.

**Tabel 3**  
**Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Pangandaran**  
**Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio (%)</b>
2014	28.722.411.021	8.314.419.343	28,90%
2015	26.501.508.055	13.053.101.574	49,25%
2016	16.964.444.205	10.034.701.782	59,15%

*Sumber : BPKD Kabupaten Pangandaran*

Berdasarkan tabel diatas data Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Akan tetapi pada realisasinya belum maksimal setiap tahunnya. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan Retribusi Daerah sebesar 8.314.419.343 atau sebesar 28,90% dari anggaran. Pada tahun 2015 sebesar 13.053.101.574 atau 49,25% dari anggaran, dan tahun 2016 sebesar 10.034.701.782 atau 59,15% dari anggaran.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang terutang pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pajak Daerah oleh Kabupaten Pangandaran mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 4**  
**Pendapatan Pajak daerah Kabupaten Pangandaran**  
**Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio (%)</b>
2014	15.948.920.472	20.548.971.809	111,06%
2015	26.675.511.033	28.298.603.322	106,08%
2016	32.851.650.185	29.249.250.499	89,03%

*Sumber : BPKD Kabupaten Pangandaran*

Berdasarkan tabel data Pendapatan Pajak Daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan pajak daerah mengalami fluktuasi. Seperti pada tahun 2014 terealisasi sebesar 20.548.971.809 dari anggarann 15.948.920.472. Pada tahun 2015 terealisasi 28.298.603.322 dari anggaran 26.675.511.033. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 29.249.250.499 dari anggaran 32.851.650.185.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan data diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kendala bagi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan .
2. Penerimaan PAD Kabupaten Pangandaran tidak terealisasi dengan baik dilihat dari data diatas.

3. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga menghambat pembangunan di kabupaten Pangandaran.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam kontribusinya pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pembangunan khususnya pada sektor pariwisata ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2016 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam kontribusinya pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pembangunan khususnya pada sektor pariwisata.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh jumlah jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2016.



## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan wawasan untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian lanjutan yang serupa dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas.

#### **b. Bagi instansi pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk pengoptimalan dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan pegawai Dinas Pariwisata dalam pengetahuan ilmu administrasi demi meningkatkan kinerja yang lebih optimal.

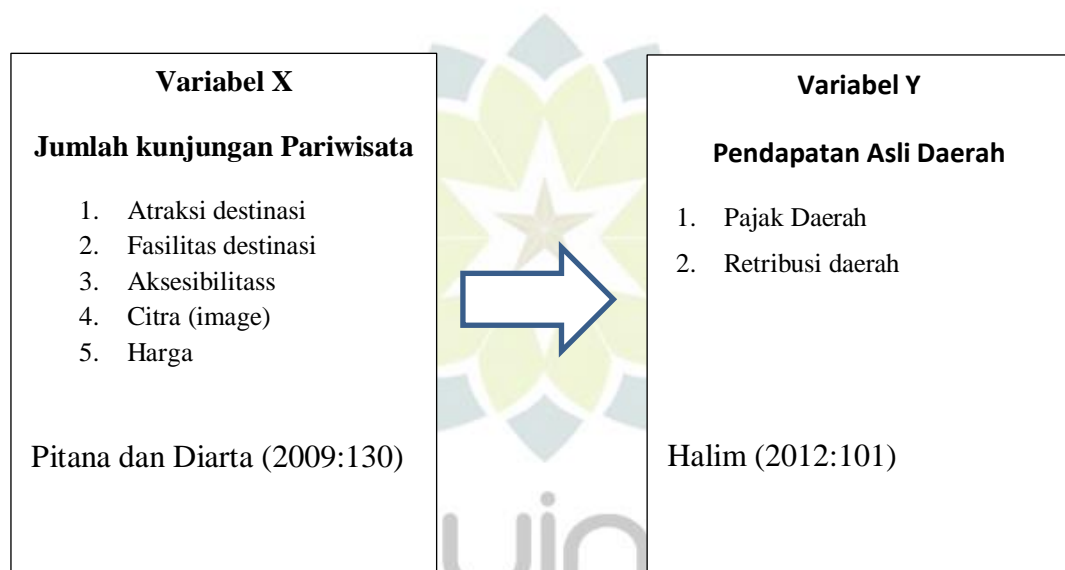
## **F. Kerangka Pemikiran**

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber

pendapatan daerah. Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh kedua variabel yaitu jumlah kunjungan wisatawan (X) dan PAD (Y) akan di tuangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1**

**Kerangka berfikir**



**G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba merumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

H<sub>a</sub> : Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.